

Analisis Tingkat Kepercayaan Masyarakat: Kualitas Personal dan Relasional Perangkat Desa dalam Pengelolaan

(Analysis of Public Trust Levels: Personal and Relational Quality of Village Officials in Governance)

Wa Ode Muhardiana^{1*}, La Ode Anto², Tuti Dharmawati³

Universitas Halu Oleo, Sulawesi Tenggara, Indonesia^{1,2,3}

waodemuhardiana99@gmail.com¹, laodeanto@gmail.com², tuti_balaka@yahoo.co.id³



Riwayat Artikel

Diterima pada 20 Mei 2025

Revisi 1 pada 2 Mei 2025

Revisi 2 pada 15 Juni 2025

Revisi 3 pada 28 Juni 2025

Disetujui pada 4 Juni 2025

Abstract

Purpose: This study aimed to analyze public trust in village officials in managing village funds, focusing on personal and relational aspects.

Methodology/approach: A quantitative approach was employed, involving 112 randomly selected respondents aged 17 years and above from a village in the West Wawoni District. Data were collected using a structured questionnaire with a trust scale that had been tested for validity and reliability.

Results/findings: Regression analysis indicated that benevolence ($\beta = 0.401$) and competence ($\beta = 0.335$) significantly influenced trust, explaining 42.5% of the variance. Integrity had no significant effect. Among the relational quality variables, only closeness was significant ($p < 0.05$), while support and reciprocity were not.

Conclusion: Trust is influenced by benevolence, competence, and intimacy. However, integrity, support, and reciprocity need to be improved to enhance public trust and fund governance.

Limitations: This study is limited by its focus on literature-based constructs without qualitative insights. It also does not address factors such as transparency and accountability. The small sample size limits generalizability.

Contribution: This study confirms the importance of personal and relational qualities in building trust while highlighting the need to improve integrity and support for more accountable village fund management

Keywords: *Integrity, Reciprocity, Support, Trust, Village-funds, Village-officials.*

How to Cite: Muhardiana, W, O., Anto, L, I., Dharmawati, T. (2025). Analisis Tingkat Kepercayaan Masyarakat: Kualitas Personal dan Relasional Perangkat Desa dalam Pengelolaan. Studi Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen, 5(2), 1-13.

1. Pendahuluan

Penyalahgunaan dana desa telah menjadi isu krusial di Indonesia sejak program dana desa diluncurkan pada tahun 2015. Program yang seharusnya menjadi katalis pembangunan desa justru ternodai oleh praktik korupsi yang melibatkan aparat desa. Nasrudin & Firmansyah (2024) mengungkapkan bahwa modus korupsi mencakup penggelapan anggaran dan manipulasi laporan keuangan. Sebagai contoh, kasus di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, menunjukkan bagaimana seorang kepala desa mengalihkan dana yang seharusnya untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat demi kepentingan pribadi. Modus operandi seperti ini, yang melibatkan penggelapan dan manipulasi laporan keuangan, tidak hanya merugikan masyarakat desa secara finansial tetapi juga meruntuhkan kepercayaan publik (Kompas, 2022). Faktor-faktor seperti lemahnya pengawasan, kurangnya transparansi, dan rendahnya kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa juga menjadi pemicu

terjadinya penyalahgunaan dana desa (Dewi et al., 2022). Lembaga lokal seperti BPD dan partisipasi aktif masyarakat sangat penting dalam pencegahan korupsi (Hariri & Dedy Stansyah, 2023), karena korupsi dana desa tidak hanya menghambat pembangunan fisik tetapi juga memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat (Nasrudin & Firmansyah, 2024).

Lebih lanjut lagi penelitian Ekawati & Sari (2024) mengemukakan bahwa pengawasan dilakukan untuk memastikan dana desa dikelola sesuai dengan rencana dan tujuan yang ingin dicapai serta mengurangi risiko yang dapat menyebabkan disintegritas dan tidak tercapainya tujuan penggunaan dana desa. Kasus serupa juga terjadi di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, di mana kepala desa ditangkap karena menggunakan dana desa untuk membeli kendaraan pribadi. Kasus ini mencerminkan disfungsi sistem pengawasan dan lemahnya akuntabilitas, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap transparansi pengelolaan dana (Tribunnews, 2022). Penelitian Ferida et al. (2023) juga memperkuat temuan ini dengan menunjukkan bahwa laporan keuangan fiktif dan penggelembungan anggaran adalah modus operandi yang umum dalam penyalahgunaan dana desa. Di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, seorang kepala desa bahkan didakwa menggelapkan lebih dari Rp1 miliar dana desa, yang seharusnya untuk pemberdayaan masyarakat malah digunakan untuk keperluan pribadi (Tribunnews, 2023).

Pengelolaan dana desa tidak terlepas dari alokasi belanja di bidang infrastruktur (Yulianita et al., 2024), namun kurangnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa menciptakan dampak yang merusak. Penelitian oleh Kurniawan et al. (2020) mengungkapkan bahwa kurangnya akuntabilitas dapat memicu korupsi yang merajalela, menghambat pembangunan infrastruktur, dan mengurangi kesejahteraan masyarakat. Ketika aparat desa tidak bertanggung jawab kepada masyarakat atas penggunaan dana, maka kepercayaan publik akan merosot. Hal ini mengarah pada *disconnected electoral*, sebuah fenomena di mana masyarakat merasa terputus dari wakil mereka, dan pada akhirnya, apatis terhadap proses pembangunan. Kurangnya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan dana desa menjadi faktor utama rendahnya akuntabilitas (Machfiroh, 2019). Dampak dari *disconnected electoral* menyebabkan hilangnya modal sosial dan potensi partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa (Mustaufiq et al., 2024), meskipun di era sekarang peningkatan transparansi dan akuntabilitas dengan menyediakan akses informasi yang lebih mudah kepada masyarakat dipermudah dengan kemajuan teknologi informasi (Rahmawati et al., 2023).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menyoroti bahwa lemahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana desa, seperti yang terjadi di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, memicu terjadinya korupsi (Kompas, 2019). Kurangnya akuntabilitas menciptakan lingkungan yang kondusif untuk penyalahgunaan wewenang dan korupsi, yang pada gilirannya menghambat kemajuan desa. Akibat dari tidak adanya akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dapat memicu dampak yang destruktif sekaligus ketidakpercayaan masyarakat. Hal ini memperlihatkan betapa pentingnya kepercayaan masyarakat sebagai landasan utama dalam tata kelola pemerintahan yang efektif, karena kepercayaan menjadi jembatan penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Kepercayaan masyarakat merupakan fondasi penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif (Wirawan & Yaya, 2024). Tingkat kepercayaan yang tinggi dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, memperkuat akuntabilitas, dan mengurangi potensi terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana. Sebaliknya, tingkat kepercayaan yang rendah dapat menghambat pembangunan dan memicu konflik sosial (L. P. Dewi et al., 2022).

Kepercayaan masyarakat merupakan fondasi penting dalam tata kelola pemerintahan yang efektif. Mayer, Davis & Schoorman (1995) mendefinisikan kepercayaan sebagai kesediaan individu atau kelompok untuk menunjukkan kerentanan mereka terhadap tindakan pihak lain yang diharapkan akan bertindak dengan penuh tanggung jawab. Dalam konteks dana desa, kepercayaan masyarakat terhadap aparat desa sangat menentukan efektivitas pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Hardin (2002) menjelaskan bahwa kepercayaan yang rendah terhadap pemerintah lokal dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pengawasan dana publik. Van De Walle & Six (2014) juga menekankan bahwa kepercayaan pada pemerintah adalah fondasi legitimasi dan efektivitas kebijakan.

Kepercayaan masyarakat memiliki dampak yang signifikan terhadap pemangku jabatan, atau dalam hal ini para perangkat desa. Six et al. (2015) menyatakan bahwa kepercayaan masyarakat adalah modal sosial yang memperkuat tata kelola pemerintahan. Kepercayaan yang tinggi akan mendorong aparatur desa untuk bertindak lebih akuntabel dan transparan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Masyarakat yang percaya pada aparatur desa akan lebih bersedia untuk berkolaborasi dan mendukung program-program pembangunan, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kemajuan desa. Sebaliknya, ketika kepercayaan masyarakat rusak akibat korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan, seperti yang ditunjukkan dalam kasus-kasus korupsi dana desa, masyarakat menjadi skeptis dan enggan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Ini menciptakan lingkaran setan di mana kurangnya kepercayaan memperburuk masalah pengelolaan dana dan dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik di tingkat desa, bahkan dengan hilangnya kepercayaan dapat menyebabkan apatisme dan bahkan perlawanan dari Masyarakat (Verhoest et al., 2024).

Pemangku kebijakan, terutama di tingkat desa, sangat membutuhkan kepercayaan masyarakat untuk menjalankan tugas mereka dengan efektif. Tanpa kepercayaan, kebijakan yang dirumuskan sulit untuk diimplementasikan, partisipasi masyarakat akan rendah, dan potensi konflik akan meningkat (Da Silva et al., 2020). Kepercayaan, menurut Hosmer (1995), adalah harapan bahwa pihak lain tidak akan bertindak oportunistik, disisi lain, Li & Betts (2011) juga mengemukakan bahwa kepercayaan menekankan pada harapan positif terhadap niat dan perilaku pihak lain. Oleh karena itu, pemangku kebijakan yang dipercaya oleh masyarakat akan lebih mudah mendapatkan dukungan dan kerjasama dalam melaksanakan program-program pembangunan. Kualitas personal dan relasional pemangku jabatan juga memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan. Levi & Stoker (2000) menyatakan bahwa individu dalam institusi pemerintahan dievaluasi berdasarkan kompetensi, integritas, keadilan, dan daya tanggap mereka, yang merupakan hasil dari interaksi dan kualitas sosial mereka terhadap masyarakat. Faturachman, Minza & Firmansyah (2020) mengidentifikasi dua aspek utama dalam kepercayaan dalam relasi sosial: aspek personal dan aspek relasional.

Aspek personal mencakup kebaikan hati (*benevolence*), integritas (*integrity*), dan kompetensi (*competence*) (Firmansyah et al., 2019). Kebaikan hati mencerminkan kepedulian aparatur desa terhadap kepentingan masyarakat. Integritas menunjukkan kejujuran dan kepatuhan aparatur desa terhadap hukum dan peraturan. Kompetensi mencerminkan kemampuan aparatur desa dalam mengelola keuangan desa secara efektif dan efisien. Aspek relasional meliputi kedekatan (*closeness*), dukungan (*support*), dan resiprositas (*reciprocity*) (Firmansyah, Faturachman, Minza 2021). Kedekatan mencerminkan hubungan yang erat antara aparatur desa dan masyarakat. Dukungan mencerminkan bantuan yang diberikan aparatur desa kepada masyarakat. Resiprositas mencerminkan timbal balik antara aparatur desa dan masyarakat. Kualitas personal dan relasional ini sangat penting karena memengaruhi cara masyarakat mempersepsikan dan mempercayai aparatur desa. Ketika aparatur desa memiliki kualitas personal dan relasional yang baik, masyarakat akan lebih cenderung untuk mempercayai mereka dan berpartisipasi aktif dalam pengelolaan dana desa.

Berdasarkan uraian mengenai pentingnya kualitas personal dan relasional dalam membangun kepercayaan, penelitian ini hadir untuk menjembatani kesenjangan pemahaman tersebut. Penelitian ini tidak hanya mengkaji kepercayaan secara teoritis, tetapi juga memberikan analisis empiris dalam konteks pengelolaan dana desa. Tujuannya adalah menganalisis tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perangkat desa, dengan fokus pada pengaruh aspek personal dan relasional. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan implikasi praktis bagi pemerintah desa dan pihak terkait. Temuan mengenai faktor personal dan relasional yang berpengaruh dapat dijadikan dasar program pelatihan dan pengembangan kapasitas perangkat desa. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi akademis dan panduan konkret untuk tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik dan akuntabel.

2. Tinjauan Pustaka

Pengelolaan dana desa secara mandiri dimaksudkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan daerah, mengurangi ketimpangan daerah, dan meningkatkan penyediaan layanan publik sehingga lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masa depan masing-masing daerah (Nahak et al., 2021). Namun permasalahan utama dalam penelitian ini adalah rendahnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Kurniawan et al. (2020) menunjukkan bahwa rendahnya

akuntabilitas ini dapat memicu korupsi yang berkelanjutan, memperlambat pembangunan, dan pada akhirnya menurunkan kesejahteraan masyarakat. Ketika aparat desa tidak bertanggung jawab terhadap penggunaan dana, kepercayaan masyarakat pun menurun, yang mengarah pada fenomena "*disconnected electoral*" atau keterputusan masyarakat dengan wakilnya. Sehingga pada bagian ini akan membahas landasan teoritis terkait kepercayaan dalam relasi sosial.

2.1 Kepercayaan

Kepercayaan merupakan konsep utama dalam memahami berbagai jenis interaksi manusia, baik dalam dunia kerja, bisnis, pendidikan, politik, maupun hubungan sosial lainnya. Kepercayaan antar individu dapat berkembang menjadi kepercayaan yang lebih luas, yaitu kepercayaan sosial (Sagatti, 2005). Dalam konteks politik, dimensi yang digunakan untuk menentukan kepercayaan terhadap tokoh politik serupa dengan dimensi yang digunakan untuk menentukan kepercayaan terhadap orang lain dalam hubungan sosial. Levi & Stoker (2000) menyatakan bahwa individu dalam sebuah institusi, terutama institusi politik (seperti partai politik dan pemerintahan), dapat dievaluasi berdasarkan kompetensi, integritas, keadilan, dan responsivitas mereka. Hal ini merupakan hasil dari interaksi dan kualitas sosial mereka terhadap masyarakat, dan dapat disebut sebagai kepercayaan sosial. Lebih lanjut lagi, Faturochman, Minza & Firmansyah (2020) mengidentifikasi dua aspek utama dalam kepercayaan dalam relasi sosial: aspek personal dan aspek relasional. Aspek personal mencakup kebaikan hati (*benevolence*), integritas (*integrity*), dan kompetensi (*competence*).

2.1.1 Aspek Personal Kepercayaan

Kebaikhatian (*Benevolence*)

1. Kebaikhatian atau juga kemurahan hati mengacu pada keyakinan bahwa seseorang akan bertindak demi kebaikan orang lain, bukan hanya untuk keuntungan pribadi. Individu yang murah hati cenderung menggunakan seluruh potensi mereka untuk membantu sesama, kemurahan hati mencakup aspek seperti perhatian, empati, kepercayaan diri, dan penerimaan terhadap orang lain.

2. Kompetensi (*Competence*)

Kompetensi adalah kemampuan untuk menjalankan tugas atau peran dengan baik. kompetensi mencakup pengalaman, pengakuan dari lembaga terkait, dan kemampuan mengelola informasi. Kompetensi menggabungkan pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan sikap.

3. Integritas (*Integrity*)

Integritas berarti adanya keselarasan antara perkataan dan tindakan. Sederhananya, integritas adalah melakukan hal yang benar meskipun tidak ada yang mengawasi. Integritas dapat dilihat dari aspek-aspek seperti keadilan, pemenuhan janji, loyalitas, kejujuran, keterandalan, dan tanggung jawab.

2.1.2 Aspek Relasional Kepercayaan

1. Kedekatan (*Closeness*)

Kedekatan dalam hal ini tidak diartikan sebagai kedekatan secara fisik dan kuantitatif, akan tetapi lebih dari itu, kedekatan disini diartikan sebagai hubungan yang erat secara emosional, yang kemudian akan menentukan kualitas kepercayaan dalam sebuah hubungan

2. Dukungan (*Support*)

Dukungan diberikan bisa sebagai bentuk apresiasi atau pertolongan yang bersifat materi maupun non-materi dengan melibatkan kontribusinya sebagai bentuk penerimaan dan keterbukaannya terhadap segala hal yang ada

3. Resiprositas (*Reciprocity*)

Resiprositas merupakan hubungan timbal-balik yang terjalin dalam sebuah relasi. Dalam sebuah relasi yang dijalin, memungkinkan terciptanya sebuah kebutuhan-kebutuhan yang kemudian akan terfasilitasi melalui hubungan timbal-balik yang dijalin dan mengarahkan kepada rasa percaya satu sama lain.

2.3 Penelitian Terdahulu

Kesenjangan utama dalam penelitian terdahulu adalah kurangnya pemahaman yang mendalam mengenai peran kepercayaan masyarakat dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa. Mayer, Davis & Schoorman (1995) mendefinisikan kepercayaan sebagai keinginan individu atau kelompok

untuk mempercayakan kerentanan mereka kepada pihak lain yang diharapkan bertindak dengan penuh tanggung jawab. Dalam konteks pengelolaan dana desa, kepercayaan masyarakat terhadap aparat desa sangat penting dalam memastikan akuntabilitas dan partisipasi aktif masyarakat. Namun, penelitian seperti yang dilakukan oleh Verhoest et al. (2024) menunjukkan bahwa rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah lokal dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana publik.

Penelitian mengenai kepercayaan sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Minza, Faturochman & Firmansyah (2020) lebih menyoroti pengaruh kepercayaan dalam relasi pertemanan. Sementara itu, penelitian oleh Wirawan & Yaya (2024), lebih menekankan peran akuntabilitas, transparansi, dan keadilan terhadap masyarakat desa. Meskipun penelitian-penelitian tersebut memberikan wawasan berharga mengenai kepercayaan dan tata kelola pemerintahan, penelitian ini berfokus secara khusus pada peran kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa, yang melibatkan unsur-unsur kebaikan hati, integritas, kompetensi, dukungan, kedekatan, dan resiprositas dari aparat desa. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan dengan mengaitkan aspek-aspek personal dan relasional dari aparat desa dengan tingkat kepercayaan masyarakat dalam konteks pengelolaan dana desa.

Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis bagaimana aspek-aspek kualitas personal seperti kebaikan hati, integritas, dan kompetensi aparat desa berperan dalam membangun kepercayaan. Kualitas personal aparat desa seperti integritas dan kompetensi sangat penting dalam membangun kepercayaan, sementara aspek relasional seperti kedekatan dan resiprositas turut memainkan peran kunci dalam menciptakan hubungan yang positif antara aparat desa dan masyarakat. Dengan memahami lebih dalam peran kepercayaan dan faktor-faktor yang memengaruhinya, penelitian ini akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan tata kelola dana desa yang lebih akuntabel dan transparan.

2.4 Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan landasan teoritis dan kerangka konseptual yang telah diuraikan, penelitian ini mengajukan dua hipotesis utama terkait dengan kepercayaan masyarakat terhadap aparat desa dalam pengelolaan dana desa. Pertama, diduga bahwa aspek personal yang meliputi kebaikan hati, integritas, dan kompetensi aparat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa masyarakat cenderung lebih mempercayai individu yang dianggap memiliki niat baik, bertindak jujur dan konsisten, serta memiliki kemampuan yang mumpuni dalam mengelola dana desa. Kedua, dihipotesiskan bahwa aspek relasional yang mencakup kedekatan, dukungan, dan resiprositas antara aparat desa dan masyarakat juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat. Keyakinan ini bertumpu pada gagasan bahwa hubungan yang dekat, adanya dukungan yang dirasakan, serta timbal balik yang adil antara aparat desa dan masyarakat akan menumbuhkan rasa saling percaya, yang pada akhirnya memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris kedua hipotesis tersebut untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap aparat desa dalam pengelolaan dana desa.

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dimana metode ini menggali lebih dalam mengenai suatu permasalahan dengan cara menguji teori yang ada. Metode ini menggunakan variabel, lalu diukur dengan angka, serta dianalisis dengan prosedur statistika dengan tujuan untuk menentukan generalisasi teori. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji hipotesis dan membangun hubungan atau pengaruh antar variabel yang bersifat deduktif, dimana teori digunakan sebagai acuan untuk menguji keterkaitan antar variabel tersebut.

3.1 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perangkat desa dalam pengelolaan dana desa, dengan fokus pada pengaruh aspek personal dan relasional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh warga di salah satu desa pada Kecamatan Wawoni Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan yang berusia 17 tahun ke atas. Untuk mendapatkan sampel yang representatif, digunakan teknik *random sampling*, dimana semua warga desa memiliki hak yang sama untuk menjadi

subjek penelitian. Dalam penelitian ini sebanyak 112 orang warga desa menjadi subjek penelitian. Dari jumlah tersebut, 53 orang (47,3%) adalah laki-laki dan 59 orang (52,7%) adalah perempuan, dengan rentang rata-rata usia partisipan adalah 42,1 tahun.

3.2 Alat Ukur Penelitian

Penelitian ini menggunakan skala kepercayaan sebagai instrumen utama untuk mengumpulkan data. Skala kepercayaan dalam penelitian ini menggunakan skala *trust and trustworthiness* yang dikembangkan dan telah diuji validitas serta reliabilitasnya oleh Faturochman, Minza & Firmansyah (2020). Skala ini menggunakan 7 poin skala Likert (1=Sangat Tidak Sesuai sampai 7=Sangat Sesuai). Dalam penelitian ini, aspek personal dengan atribut kebaikan, kompetensi, dan integritas; serta aspek relasional dengan atribut kedekatan, dukungan dan resiprositas bertindak sebagai variabel independen dan kepercayaan itu sendiri bertindak sebagai variabel dependen. Skala ini disebarkan secara daring, sehingga peneliti tidak memiliki data *respon rate* terkait berapa banyak penyebaran skala yang dilakukan oleh masing-masing partisipan penelitian.

3.3 Alur Penelitian

Prosedur penelitian diawali dengan pemberian lembar *informed consent* kepada setiap partisipan. Lembar ini menjelaskan secara rinci mengenai tujuan penelitian, prosedur yang akan dilakukan, serta hak-hak partisipan sebagai subjek penelitian. Partisipan yang setuju untuk berpartisipasi menandatangani lembar *informed consent* tersebut sebagai bentuk persetujuan. Setelah itu, partisipan diminta untuk mengisi data diri yang mencakup informasi demografis seperti usia, jenis kelamin, dan informasi lain yang relevan. Setelah data diri terisi, partisipan kemudian diminta untuk mengisi skala kepercayaan. Skala ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk mengukur tingkat kepercayaan partisipan terhadap perangkat desa dalam pengelolaan dana desa, dengan mempertimbangkan aspek personal dan relasional yang telah diidentifikasi dalam landasan teori.

3.4 Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan melalui skala kepercayaan kemudian dianalisis menggunakan analisis regresi sederhana. Terdapat dua tahap dalam analisis data penelitian, pertama, analisis data atribut personal untuk menemukan aspek tertinggi dalam kualitas personal; kedua, analisis data atribut relasional untuk menemukan aspek tertinggi dalam kualitas relasi. Analisis ini dilakukan dengan bantuan perangkat lunak SPSS (*Statistical Package for the Social Sciences*). Tujuan dari analisis ini adalah untuk menguji dan melihat seberapa besar pengaruh aspek personal dan relasional terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perangkat desa dalam pengelolaan dana desa.

4. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini terlebih dahulu menyajikan tabel statistik deskriptif yang memberikan gambaran mengenai data yang telah dikumpulkan. Untuk jenis kelamin diketahui bahwa subjek dalam penelitian ini didominasi oleh jenis kelamin perempuan, yakni sebanyak 59 subjek (52,7%).

Tabel 1. Deskripsi Subjek Penelitian Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Subjek	Persentase (%)
1.	Perempuan	59	52,7%
2.	Laki-laki	53	47,3%
Total		112	100%

Lebih lanjut lagi, usia responden yang mengisi kuesioner didominasi oleh rentan usia 36-40, secara spesifik dapat dilihat dari table dibawah ini:

Tabel 2. Deskripsi Subjek Penelitian Berdasarkan Usia

Kategori Usia	Jumlah Subjek	Persentase
17-20	9	8,04%
21-25	18	16,07%

26-30	24	21,43%
30-35	14	12,5%
36-40	32	28,57%
>41	15	13,39%
	112	100%

Dan terakhir, data terkait profesi/ pekerjaan subjek penelitian didominasi oleh petani dengan sebanyak 22 subjek (21,43%), secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Deskripsi Subjek Penelitian Berdasarkan Pekerjaan

No	Aktivitas	Jumlah Subjek	Presentase
1	Pelajar	21	18,75%
2	Pegawai	12	10,71%
3	Wiraswasta	9	8,04%
4	Buruh	15	13,39%
5	Petani	24	21,43%
6	Nelayan	22	19,64%
7	Tidak bekerja	9	8,04%
Total		112	100%

Penelitian ini Terdapat dua hasil dari penelitian ini. Pertama, hasil analisis yang bertujuan untuk menemukan aspek tertinggi yang berperan dalam kepercayaan masyarakat terhadap kualitas personal perangkat desa, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi kualitas Personal Perangkat Desa					
Variabel Independen	Variabel Dependen	β (Beta)	F	p	R²
Kebaikhatian	Kepercayaan	0,401*	16.27	0,00	0,425
Kompetensi		0,335*			
Integritas		0,034 ^{ts}			
*p<0,05					

Berdasarkan tabel tersebut, menunjukkan bahwa terdapat pengaruh kebaikan, kompetensi, dan integritas terhadap kepercayaan. Adapun kontribusinya sebesar 42,5%. Namun, integritas terlihat tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepercayaan (p=0,717).

Hasil analisis tahap dua bertujuan untuk menemukan aspek tertinggi yang berperan dalam kepercayaan masyarakat dalam kualitas relasi perangkat desa, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi kualitas Relasi Perangkat Desa					
Variabel Independen	Variabel Dependen	β (Beta)	F	p	R ²
Kedekatan	Kepercayaan	0,302*	14.03	0,00	0,312
Dukungan		0,045 ^{ts}			
Resiprositas		0,044 ^{ts}			
*p<0.05					

Berdasarkan tabel tersebut, menunjukkan bahwa terdapat pengaruh kedekatan, dukungan, dan resiprositas terhadap kepercayaan. Adapun kontribusinya sebesar 31,2%. Namun, dukungan (p=0,511) dan resiprositas (p=0,282) terlihat tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepercayaan.

4.1 Pembahasan

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kualitas personal dan relasional perangkat desa berperan dalam kepercayaan masyarakat Sesuai dengan hasil penelitian, ditemukan bahwa dalam kualitas personal kontribusi kebaikan, kompetensi dan integritas sebesar 42,5% terhadap kepercayaan, meskipun demikian, secara spesifik integritas dinyatakan tidak memiliki pengaruh

terhadap kepercayaan masyarakat kepada perangkat desa dalam pengelolaan dana desa. Di sisi lain, berdasarkan hasil analisis data ditemukan juga bahwa kualitas relasi perangkat desa dalam menyumbang kepercayaan masyarakat berkontribusi sebesar 31,2%, namun yang dinyatakan signifikan terhadap kepercayaan masyarakat hanya pada aspek kedekatan saja, sedangkan untuk aspek dukungan dan resiprositas dinyatakan tidak signifikan.

Kepercayaan masyarakat terhadap perangkat desa merupakan modal sosial krusial bagi efektivitas pemerintahan dan pembangunan desa, berperan sebagai fondasi kerjasama, reduksi konflik, dan peningkatan partisipasi masyarakat. Konsep kepercayaan ini, dipahami melalui teori modal sosial oleh Six et al. (2015) dimana mencakup jaringan norma, kepercayaan, dan timbal balik yang memfasilitasi tindakan kolektif. Studi Leblang et al. (2022) mengilustrasikan bagaimana kepercayaan mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan efisiensi ekonomi, sementara Moreno et al. (2021) menekankan pentingnya kualitas pelayanan publik dan keadilan dalam membangun kepercayaan pemerintah. Berbagai faktor mempengaruhi kepercayaan masyarakat, termasuk kualitas pelayanan publik, partisipasi dalam pengambilan keputusan, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah desa (Kuncahyo & Dharmakarja, 2022).

Pengelolaan dana desa yang efektif, dipengaruhi oleh kepercayaan (Ardiansyah & Sriyono, 2021). Desentralisasi pelayanan masyarakat hingga pengelolaan dana, dapat meningkatkan kepercayaan jika dibarengi peningkatan kapasitas dan akuntabilitas pemerintah lokal (Dewi et al., 2022), atau dalam hal ini tingkat desa. Kepercayaan yang tinggi berkorelasi positif dengan partisipasi pembangunan, kepatuhan kebijakan, dan kepuasan pelayanan publik, sedangkan rendahnya kepercayaan menghambat partisipasi dan implementasi program. Dewi & Sudiana (2022) menyoroti pentingnya data dan transparansi dalam meningkatkan kepercayaan publik untuk pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, aspek-aspek kepercayaan seperti; peningkatan kualitas pelayanan, partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, dan pemanfaatan data menjadi hal yang krusial bagi pemerintah desa dalam membangun dan memelihara kepercayaan publik untuk pembangunan desa yang berkelanjutan dan berkualitas (Rahmawati et al., 2023). Kepercayaan dalam pengelolaan dana desa merupakan faktor kunci yang memengaruhi interaksi antara masyarakat dan aparatur desa. Menurut penelitian Faturochman, Minza & Firmansyah (2020), kepercayaan melibatkan aspek personal dan relasional yang penting dalam membangun hubungan yang kokoh di berbagai konteks.

4.1.1 Kualitas Personal Perangkat Desa dalam Membangun Kepercayaan

Dalam konteks organisasi publik, seperti yang dikemukakan oleh Mayer, Davis & Schoorman (1995) kepercayaan mencakup tiga komponen utama: *benevolence* (niat baik), *competence* (kompetensi), dan *integrity* (integritas). Ketiga aspek ini juga ditegaskan oleh (Firmansyah et al., 2019) sebagai elemen penting kualitas personal individu dalam membangun kepercayaan, terutama pengelolaan dana desa. Masyarakat menilai kebaikan aparatur desa, kemampuan mereka dalam mengelola dana, dan integritas mereka dalam menjalankan tugas secara jujur dan transparan, penilaian terhadap ketiga hal ini menjadi dasar kepercayaan masyarakat pada aparatur desa dalam pengelolaan dana desa.

Aspek *benevolence*, niat baik, atau kebaikan itu sendiri merujuk pada keyakinan bahwa aparatur desa berkomitmen untuk bertindak demi kepentingan masyarakat. Dalam konteks pengelolaan dana desa, jika masyarakat merasakan bahwa aparatur desa benar-benar berusaha untuk menggunakan dana dengan bijak demi kesejahteraan bersama, tingkat kepercayaan mereka akan meningkat. Sebaliknya, jika niat baik ini diragukan, masyarakat mungkin merasa skeptis terhadap setiap tindakan yang diambil oleh aparatur desa. Hal ini sejalan dengan temuan dari Six et al. (2015) yang menekankan pentingnya '*generalized trust*' atau kepercayaan umum dalam membangun kohesi sosial. Penelitian terbaru dari Wirawan & Yaya (2024) juga menyoroti bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah kunci untuk meningkatkan persepsi masyarakat terhadap niat baik aparatur desa.

Kompetensi sebagai aspek kedua, mengacu pada kemampuan teknis dan pengetahuan yang dimiliki oleh aparatur desa dalam mengelola dana secara efektif. Dalam penelitian Alamsyah et al. (2023) menemukan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah dapat dipengaruhi oleh variabel kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan masyarakat, sehingga masyarakat perlu diyakinkan bahwa aparatur desa memiliki keahlian yang memadai untuk mengelola dana desa dengan

benar, memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai peruntukan. Jika kompetensi ini tidak terlihat atau tidak diyakini, hal ini dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparatur desa, seperti yang sering terlihat dalam kasus-kasus penyalahgunaan dana desa di Indonesia. Hal ini juga didukung oleh studi dari Dewi & Sudiana (2022) yang menyoroti pentingnya kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya kolektif. Lebih lanjut lagi, penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan bagi aparatur desa sangat penting untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam mengelola dana.

Aspek terakhir, integritas, sangat terkait dengan kejujuran dan konsistensi dalam tindakan aparatur desa. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa integritas dinyatakan tidak signifikan dalam memengaruhi kepercayaan ($p > 0,05$). Integritas menekankan pentingnya bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika yang tinggi. Ketika aparatur desa mempertahankan integritasnya, masyarakat akan lebih percaya bahwa pengelolaan dana dilakukan dengan transparansi, sehingga mengurangi potensi terjadinya penyalahgunaan dana. Meskipun integritas secara teoritis penting untuk membangun kepercayaan, penelitian ini menunjukkan tidak ada pengaruh signifikannya terhadap kepercayaan masyarakat pada perangkat desa. Hal ini mungkin disebabkan oleh: (1) persepsi dasar masyarakat bahwa perangkat desa sudah cukup berintegritas, sehingga faktor lain seperti kompetensi dan kebaikhatian lebih diutamakan; (2) indikator integritas yang digunakan kurang representatif, misalnya, hanya fokus pada transparansi keuangan, bukan keadilan dan kejujuran; (3) potensi bias pengumpulan data, di mana responden mungkin enggan memberikan penilaian negatif karena kedekatan personal atau takut konsekuensi sosial. Wang (2019) juga menegaskan bahwa integritas dan kejujuran dalam hubungan antar individu dan institusi, adalah fondasi utama bagi kemajuan ekonomi dan sosial. Penelitian dari Rahmawati et al. (2023) juga menggarisbawahi pentingnya mekanisme pengawasan yang efektif untuk menjaga integritas aparatur desa. Dalam pengelolaan dana desa, tiga aspek ini—kebaikhatian, kompetensi, dan integritas—saling berhubungan dan memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparatur desa. Dengan meningkatkan ketiga aspek ini, kepercayaan masyarakat akan tumbuh, yang pada akhirnya dapat mengurangi peluang terjadinya penyalahgunaan dana.

4.1.2 Kualitas Relasional Perangkat Desa dalam Membangun Kepercayaan

Kepercayaan merupakan elemen krusial dalam keberhasilan pengelolaan dana desa, juga dibangun di atas fondasi kualitas relasi aparatur desa (kedekatan, dukungan, dan resiprositas) dengan masyarakat. Kepercayaan lebih dari sekadar mekanisme administratif; ia adalah perekat sosial yang mengikat perangkat desa dan masyarakat dalam upaya kolektif mencapai pembangunan berkelanjutan dan inklusif. Kedekatan antara perangkat desa dan masyarakat tidak hanya hubungan geografis atau formal, melainkan interaksi sosial intensif dan bermakna (Wang & Li, 2019). Interaksi ini menciptakan ruang saling mengenal, memahami perspektif, dan membangun empati. Kedekatan terbangun melalui partisipasi aktif dalam kegiatan desa seperti gotong royong, musyawarah, acara keagamaan atau budaya, memungkinkan perangkat desa merasakan langsung kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta membangun hubungan personal. Komunikasi terbuka dan jujur menjadi kunci kedekatan; perangkat desa yang bersedia mendengarkan keluhan dan saran, serta memberikan penjelasan transparan tentang kebijakan dan program dana desa, akan lebih dipercaya (Dewi & Sudiana, 2022). Kedekatan juga memungkinkan pemahaman konteks sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi pengelolaan dana desa, penting untuk merancang program relevan dan berkelanjutan.

Lebih lanjut lagi, hasil penelitian ini menunjukkan tidak signifikannya pengaruh dukungan dan resiprositas terhadap kepercayaan Masyarakat yang dapat mengindikasikan bahwa masyarakat lebih fokus pada kualitas personal dan kedekatan emosional dengan perangkat desa. Ada kemungkinan bahwa dukungan yang diberikan oleh perangkat desa belum dirasakan secara langsung oleh masyarakat, sehingga tidak berdampak signifikan pada kepercayaan; atau resiprositas yang terjadi mungkin lebih bersifat normatif dan tidak dikaitkan secara langsung dengan kepercayaan. Masyarakat mungkin merasa wajib untuk membalas kebaikan perangkat desa, terlepas dari tingkat kepercayaan mereka; justifikasi terakhir, kemungkinan ukuran dukungan dan resiprositas yang digunakan dalam penelitian ini mungkin kurang sensitif dalam menangkap nuansa hubungan antara perangkat desa dan masyarakat.

Dukungan, baik dari masyarakat kepada perangkat desa maupun sebaliknya, adalah manifestasi keyakinan akan kompetensi dan integritas masing-masing pihak, mencerminkan komitmen bersama terhadap pembangunan partisipatif dan kesejahteraan masyarakat desa. Dukungan masyarakat terhadap program dana desa menunjukkan kepercayaan pada kemampuan perangkat desa mengelola dana secara efektif dan transparan (Wirawan & Yaya, 2024), yang terbangun melalui kinerja perangkat desa yang akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, meskipun demikian, dukungan aparatur desa terhadap masyarakat dalam penelitian ini dinyatakan tidak signifikan dalam hubungannya dengan kepercayaan ($p > 0,05$) hal ini mengindikasikan bahwa perangkat desa juga harus mendukung inisiatif masyarakat, baik finansial, teknis, atau administratif untuk proyek-proyek yang diusulkan masyarakat, menunjukkan komitmen terhadap pembangunan partisipatif (Machfiroh, 2019). Keterlibatan aktif kedua belah pihak dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program dana desa sangat penting untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Resiprositas, prinsip saling memberi dan menerima, menciptakan siklus kepercayaan yang positif (Six et al., 2015; Van De Walle & Six, 2014). Dalam pengelolaan dana desa, resiprositas berarti setiap pihak bersedia memberikan kontribusi dan manfaat bagi yang lain, memperkuat ikatan sosial dan kepercayaan, namun hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek resiprositas para perangkat desa tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan kepercayaan masyarakat ($p > 0,05$). Idealnya, perangkat desa yang memberikan layanan publik berkualitas akan mendapatkan kepercayaan masyarakat. Sebaliknya, masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam program desa akan membantu perangkat desa mencapai tujuan pembangunan. Transparansi dalam pengelolaan dana desa adalah kunci membangun resiprositas; perangkat desa yang transparan dalam penggunaan dana akan memperoleh kepercayaan masyarakat (Wirawan & Yaya, 2024), yang pada gilirannya akan mendukung program pembangunan. Akuntabilitas berarti bahwa perangkat desa bertanggung jawab atas tindakan mereka dan bersedia mempertanggungjawabkan penggunaan dana kepada masyarakat. Siklus resiprositas menciptakan lingkungan di mana kepercayaan terus tumbuh dan memperkuat hubungan antara perangkat desa dan masyarakat.

Kualitas personal (kebaikhatian dan kompetensi) serta kualitas relasional (kedekatan) secara statistik dinilai signifikan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap perangkat desa. Namun, hal tersebut tidak serta merta menjamin pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel. Kebaikhatian dan kompetensi harus diimbangi dengan integritas yang tinggi dalam penggunaan dana desa untuk mencegah potensi penyelewengan dan korupsi, dengan begitu kualitas personal perangkat desa akan lengkap dalam pengaruhnya ke kepercayaan masyarakat. Kedekatan dengan masyarakat, meskipun signifikan, seharusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan dan resiprositas yang nyata dari perangkat desa kepada masyarakat, sehingga tercipta sinergi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa untuk kesejahteraan bersama.

5. Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis tingkat kepercayaan masyarakat berdasarkan kualitas personal dan relasi perangkat desa dalam mengelola dana desa. Analisis regresi menunjukkan bahwa dari kualitas personal, aspek kebaikan (*benevolence*) ($\beta = 0,401$) dan kompetensi ($\beta = 0,335$) perangkat desa memiliki pengaruh signifikan ($p < 0,05$) terhadap kepercayaan masyarakat, dengan kebaikan menunjukkan pengaruh yang lebih dominan daripada kompetensi, sedangkan aspek integritas tidak menunjukkan pengaruh signifikan ($p = 0,717$). Kualitas personal menjelaskan bahwa sebesar 42,5% memiliki pengaruh ke kepercayaan masyarakat terhadap perangkat desa dalam pengelolaan dana desa. Disisi lain, pada kualitas relasi, hanya aspek kedekatan dengan masyarakat yang berpengaruh signifikan ($p < 0,05$), sementara aspek dukungan dan resiprositas tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Kualitas relasi menjelaskan bahwa sebesar 31,2% dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap perangkat desa dalam pengelolaan dana desa.

Meskipun penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas personal dan kualitas relasional dengan masyarakat penting dalam membangun kepercayaan, namun hal tersebut tidak menjamin pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel. Kebaikhatian dan kompetensi perlu dibarengi dengan integritas dalam penggunaan dana desa agar terhindar dari potensi penyelewengan dan korupsi.

Begitupun pada kedekatan sebagai satu-satunya aspek yang signifikan di dari kualitas relasi. Kedekatan dengan masyarakat justru seharusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan partisipasi dalam pengawasan pengelolaan dana desa, sehingga perlu dibarengi dengan dukungan dan resiprositas ke masyarakat.

Limitasi dan Studi Lanjutan

Berdasarkan hasil penelitian ini, yang menekankan pentingnya kualitas personal dan relasional dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap perangkat desa, disarankan agar perangkat desa memprioritaskan peningkatan integritas sebagai bagian dari kualitas personal. Meskipun kebaikan dan kompetensi penting, pelatihan dan pengembangan diri juga harus berfokus pada peningkatan integritas dalam mengelola pemerintahan desa, khususnya dalam pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel. Peningkatan integritas ini krusial untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana desa. Selain itu, perangkat desa perlu secara aktif membangun kedekatan dengan masyarakat, namun kedekatan saja tidak cukup. Kedekatan ini harus dibarengi dengan peningkatan dukungan dan resiprositas kepada masyarakat melalui kegiatan yang partisipatif, kunjungan rutin, dan komunikasi dua arah. Kedekatan, dukungan, dan resiprositas yang efektif akan menjembatani kesenjangan dan meningkatkan kepercayaan.

Berdasarkan tingginya kasus penyalahgunaan dana desa dan dampaknya terhadap pembangunan dan potensi konflik sosial, penelitian lanjutan sangat disarankan untuk mengevaluasi lebih lanjut bagaimana membangun integritas, dukungan, dan resiprositas yang efektif, serta menggali lebih dalam faktor-faktor lain yang mungkin berpengaruh, seperti transparansi dan akuntabilitas. Penggunaan sampel yang lebih besar dan representatif dalam penelitian selanjutnya juga akan memperkuat generalisasi hasil. Harapannya, penelitian ini dan penelitian selanjutnya dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang konkrit untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa, sehingga berkontribusi pada upaya membangun pemerintahan desa yang lebih baik, adil, dan sejahtera.

Ucapan terima kasih

Terimakasih kepada *Center for Indigenous & Cultural Psychology* UGM dan berbagai pihak yang berperan di dalamnya, karena Instrumen dalam artikel jurnal ini berdasarkan hasil pengembangan variabel dan Instrumen kepercayaan (*trust*) oleh *Center for Indigenous & Cultural Psychology* UGM dan berbagai pihak yang berperan di dalamnya. Isi sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Referensi

- Alamsyah, M. I., Wibisono, C., & Satriawan, B. (2023). Analysis of factors affecting the quality of Bintan District government financial reports. *Journal of Governance and Accountability Studies*, 3(1), 13–27.
- Ardiansyah, M. D., & Sriyono, S. (2021). The Influence of Competence, Role of Village Apparatus and Understanding of Village Fund Management on Village Fund Management Accountability. *Indonesian Journal of Cultural and Community Development*, 10. <https://doi.org/10.21070/ijccd2021759>
- Dewi, L. P., Sunaryo, K., & Yulianti, R. (2022). PENGARUH KOMPETENSI APARATUR, MORALITAS INDIVIDU, BUDAYA ORGANISASI, PRAKTIK AKUNTABILITAS, DAN WHISTLEBLOWING TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD DALAM PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Empiris Pada Desa di Kecamatan Prambanan, Klaten). *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 9(2), 327–340. <https://doi.org/10.25105/jat.v9i2.13870>
- Dewi, N. M. A. M., & Sudiana, I. W. (2022). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 85–95. <https://doi.org/10.32795/hak.v3i2.2430>
- Ekawati, E., & Sari, Y. M. (2024). Financial governance: Cases at Village-Owned Enterprises (BUMDEs) in Lampung Province. *International Journal of Financial, Accounting, and Management*, 6(1), 105–116. <https://doi.org/10.35912/ijfam.v6i1.1625>
- Ferida, A., Alfian, M., & Majid, N. F. (2023). FAKTOR TERJADINYA TINDAK KECURANGAN PENGELOLAAN DANA DESA DENGAN PENGGUNAAN SISKEUDES SEBAGAI VARIABEL MEDIASI (STUDI PADA PERANGKAT DESA SE KABUPATEN TEGAL).

- Kompartemen : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 20(2), 315.
<https://doi.org/10.30595/kompartemen.v20i2.13966>
- Firmansyah, M. R., Amelia, R., Jamil, R. A., Faturachman, F., & Minza, W. M. (2019). BENEVOLENCE, COMPETENCY, AND INTEGRITY: WHICH IS MORE INFLUENTIAL ON TRUST IN FRIENDSHIPS? *Jurnal Psikologi*, 18(1), 91. <https://doi.org/10.14710/jp.18.1.91-105>
- Firmansyah, M. R., Faturachman, F., & Minza, W. M. (2021). Do closeness, support, and reciprocity influence trust in friendship? *Jurnal Psikologi Sosial*, 19(1), 59–68. <https://doi.org/10.7454/jps.2021.07>
- Handry Nahak, J., Kase, P., & Bumi Kelen, P. (2021). Society participation in the village fund program for development in Kletek village, Central Malaka sub-district, Malaka regency. *Annals of Human Resource Management Research*, 1(1), 55–67. <https://doi.org/10.35912/ahrmr.v1i1.323>
- Hariri, A., & Dedy Stansyah. (2023). Existence of the Government Internal Supervisory Inspectorate (APIP) as an Internal Supervisor of Local Government. *Law and Justice*, 8(2), 165–175. <https://doi.org/10.23917/laj.v8i2.2284>
- Hosmer, L. T. (1995). Trust: The Connecting Link between Organizational Theory and Philosophical Ethics. *The Academy of Management Review*, 20(2), 379. <https://doi.org/10.2307/258851>
- Kuncahyo, H. D., & Dharmakarja, I. G. M. A. (2022). Pengaruh Kompetensi, Peran Aparat Desa, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Mojogedang Karanganyar Jawa Tengah. *Akuntansiku*, 1(4), 299–319. <https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v1i4.316>
- Kurniawan, R., Junaidi, J., & Muhammad, M. (2020). Analysis of Village Fund Supervision in Gampong Geulumpang Tujoh, Matangkuli District (Study at the Inspectorate of North Aceh Regency). *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 3(2), 101–108. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v3i2.1139>
- Leblang, D., Smith, M. D., & Wesselbaum, D. (2022). The effect of trust on economic performance and financial access. *Economics Letters*, 220, 110884. <https://doi.org/10.1016/j.econlet.2022.110884>
- Levi, M., & Stoker, L. (2000). Political Trust and Trustworthiness. *Annual Review of Political Science*, 3(1), 475–507. <https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.3.1.475>
- Li, F., & Betts, S. C. (2011). Trust: What It Is And What It Is Not. *International Business & Economics Research Journal (IBER)*, 2(7). <https://doi.org/10.19030/iber.v2i7.3825>
- Machfiroh, I. S. (2019). AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA BENUA TENGAH. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 1(1), 14–21. <https://doi.org/10.34128/jra.v1i1.5>
- Maria Da Silva, L., Nursalam, N., & Toda, H. (2020). Policy implementation of local governments in waste management in Dili City, Timor Leste. *Journal of Governance and Accountability Studies*, 1(1), 1–13. <https://doi.org/10.35912/jgas.v1i1.343>
- Mayer, R. C., Davis, J. H., & Schoorman, F. D. (1995). An Integrative Model of Organizational Trust. *The Academy of Management Review*, 20(3), 709. <https://doi.org/10.2307/258792>
- Minza, W. M., Faturachman, F., & Firmansyah, M. R. (2020). Trust and Trustworthiness of Friendship Relation In Yogyakarta and Makassar. *Jurnal Psikologi*, 47(2), 75. <https://doi.org/10.22146/jpsi.44827>
- Moreno, Á., Tench, R., & Verhoeven, P. (2021). Trust in Public Relations in the Age of Mistrusted Media: A European Perspective. *Publications*, 9(1), 7. <https://doi.org/10.3390/publications9010007>
- Mustaufiq, M., Sultan, L., Ridwan, Muh. S., & Hasan, H. (2024). THE SUPERVISION OF THE INTERNAL GOVERNMENT INTERNAL SUPERVISORY APPARATUS (APIP) ON THE ABUSE OF AUTHORITY IN GOVERNMENTAL POSITIONS IN JENEPONTO REGENCY. *ANAYASA : Journal of Legal Studies*, 2(1), 56–74. <https://doi.org/10.61397/ays.v2i1.192>
- Nasrudin, T., & Firmansyah, A. (2024). Menutup celah korupsi: Evaluasi pengawasan APIP dalam pengelolaan dana desa di Indonesia. *Akuntansiku*, 3(4), 243–250. <https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v3i4.1173>

- Rahmawati, R., Heriana, T., Diana Sari, M., Dewi, S., & Almas, N. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa: Kompetensi Aparatur, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal. *Jurnal Minfo Polgan*, 12(1), 1533–1542. <https://doi.org/10.33395/jmp.v12i1.12881>
- Six, B., Van Zimmeren, E., Popa, F., & Frison, C. (2015). Trust and social capital in the design and evolution of institutions for collective action. *International Journal of the Commons*, 9(1), 151. <https://doi.org/10.18352/ijc.435>
- Van De Walle, S., & Six, F. (2014). Trust and Distrust as Distinct Concepts: Why Studying Distrust in Institutions is Important. *Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice*, 16(2), 158–174. <https://doi.org/10.1080/13876988.2013.785146>
- Verhoest, K., Latusek, D., Six, F., Maman, L., Papadopoulos, Y., Schomaker, R. M., & Trondal, J. (2024). Trust and distrust in public governance settings: Conceptualising and testing the link in regulatory relations. *Journal of Trust Research*, 14(2), 127–156. <https://doi.org/10.1080/21515581.2024.2383918>
- Wang, M. (2019). Social Integrity and the Cost of Equity Capital. *Open Journal of Business and Management*, 07(01), 229–244. <https://doi.org/10.4236/ojbm.2019.71016>
- Wang, X., & Li, H. (2019). Positive Interaction Between Government and Society in the Innovation of Grassroots Social Governance. *Proceedings of the 2nd International Conference on Economy, Management and Entrepreneurship (ICOEME 2019)*. <https://doi.org/10.2991/icoeme-19.2019.68>
- Wirawan, R. F., & Yaya, R. (2024). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Keadilan terhadap Kepercayaan Masyarakat pada Pemerintah Desa: Apakah Kepuasan Masyarakat Memediasi? *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 8(1), 87–104. <https://doi.org/10.18196/rabin.v8i1.20334>
- Yulianita, A., Subardin, S., & Zulfikri, Z. (2024). Government size and digital inequality in Indonesia. *Journal of Governance and Accountability Studies*, 4(1), 31–41. <https://doi.org/10.35912/jgas.v4i1.1981>